

KEBIJAKAN KEAMANAN JEPANG

Endi RUKMO*

Jepang merupakan negara industri maju yang sangat menggantungkan kelangsungan hidupnya pada perdagangan internasional. Karena langkanya sumber energi dan bahan mentah untuk keperluan industrinya, serta sumber-sumber lain seperti sumber makanan, negara ini tergantung sekali pada impor dari negara-negara lain, terutama dari kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat. Sementara itu Jepang telah pula berhasil menguasai pasaran barang-barang industrinya terutama di kawasan Asia Tenggara, sehingga hubungan dagang dengan kawasan itu semakin meningkat. Jadi tanpa perdagangan internasional itu, Jepang tidak dapat mempertahankan tingkat hidup seperti yang sekarang ini.

Karena perdagangan internasionalnya itu sebagian besar dilakukan melalui laut, Jepang merasa keamanan jalur-jalur perdagangannya itu sangat rawan terhadap suatu serangan dari pihak musuh. Ancaman serangan itu bisa saja datang, misalnya dari Uni Soviet bukan saja karena persengketaannya atas wilayah utara, tetapi juga karena keterlibatan Jepang di dalam persengketaan global antara Timur dan Barat. Jepang merasa ancaman itu semakin meningkat dengan makin bertambahnya kekuatan Uni Soviet di sekitar wilayah Jepang dan semakin agresifnya Uni Soviet memperluas pengaruhnya ke negara-negara Asia, terutama sesudah invasi militer Uni Soviet di Afghanistan tahun 1979.

Di samping faktor menurunnya kepercayaan rakyat Jepang kepada Amerika Serikat untuk mempertahankan Jepang bila terjadi suatu keadaan kritis,¹ faktor ancaman Uni Soviet itu merupakan pertimbangan utama Je-

*Staf CSIS.

¹Perasaan itu timbul sebenarnya sejak Doktrin Nixon pada awal tahun 1970-an, dan kemudian meningkat karena kekalahan Amerika Serikat di Indocina dan rencana Pemerintah Carter untuk menarik semua kekuatan militernya dari kawasan Asia.

pang dalam menentukan kebijakan keamanannya secara menyeluruh, yang terutama dititikberatkan pada kebijakan pertahanan untuk meningkatkan kemampuan Pasukan Bela Diri Jepang. Namun, usaha Jepang itu rupanya menggelisahkan bangsa-bangsa Asia Tenggara, terutama ASEAN, khususnya dengan rencana pertahanan jalur-jalur laut vital bagi suplai energi dan sumber-sumber lainnya itu.

Tulisan ini akan membahas tentang kebijakan keamanan Jepang itu dengan melihatnya dari segi ancaman utama, Uni Soviet, usaha-usaha Jepang untuk mengatasinya dan reaksi-reaksi negara-negara ASEAN akibat rencana dan pelaksanaan kebijakan pertahanan yang menjadi titik berat kebijakan keamanan Jepang itu.

ANCAMAN UTAMA BAGI KEAMANAN JEPANG

Berbicara mengenai kebijakan keamanan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari ancaman yang dirasakan dan sedang dihadapi oleh negara itu. Bila ancaman itu tidak segera dapat diatasi, maka ia akan membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Ada dua sumber utama ancaman keamanan suatu negara, yaitu ancaman yang timbul dari dalam negara itu sendiri, misalnya, kekacauan, kerusuhan politik dan gangguan-gangguan lainnya, dan yang datang dari luar, seperti agresi dan intervensi dari negara lain. Bagi Jepang agaknya ancaman yang datang dari luar merupakan ancaman utama bagi keamanannya. Oleh karenanya kebijakan keamanan negara itu lebih difokuskan kepada kebijakan pertahanan negara dalam usaha mencegah dan mungkin menghadapi suatu agresi yang akan dilancarkan oleh negara lain.

Untuk memelihara keamanan nasional, Pemerintah Jepang sedang melancarkan tiga usaha yang terkoordinasi, yaitu: *pertama*, meningkatkan kerja sama dan solidaritas dengan negara-negara Barat dan negara-negara lain, meningkatkan kerja sama yang lebih positif di forum PBB guna memelihara keamanan dan perdamaian dunia, membantu menciptakan kestabilan politik internasional dan pembangunan ekonomi melalui cara-cara diplomatik. *Kedua*, meningkatkan kemampuan pertahanan militer guna menjera (to deter) suatu agresi dan sebagai persiapan untuk menanggulangi suatu agresi. *Ketiga*, tetap memelihara pengaturan keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat dan menjamin pelaksanaannya yang lancar.¹

Pada saat ini rupanya Jepang lebih menitikberatkan pada koordinasi usaha kedua dan ketiga. Melihat ancaman yang sedang ia hadapi, sukar kira-

¹*Defense of Japan 1982*, hal. 52. Ketiga usaha ini adalah inti dasar Kebijakan Pertahanan Nasional Jepang yang diputuskan Kabinet bulan Mei 1957.

nya bagi Jepang untuk hanya menghadapinya dengan jalan diplomasi atau usaha-usaha non-militer lainnya. Uni Soviet merupakan ancaman utama bagi Jepang, yang tidak mungkin hanya dihadapi dengan cara-cara diplomasi saja, mengingat Uni Soviet ini tidak saja merupakan negara yang mempunyai kekuatan militer super, tetapi juga karena sebagai superpower saingan Amerika Serikat, ia ingin terus memperluas pengaruhnya.

Meskipun hubungan antara Jepang dan Uni Soviet telah dipulihkan kembali sejak tahun 1956, hubungan kedua negara ini masih belum dapat ditingkatkan, terutama karena masih adanya masalah teritorial yang hingga kini belum dapat diselesaikan. Empat pulau di sebelah utara Jepang, yaitu Kepulauan Habomai, Pulau Shikotan, Pulau Kunashiri dan Pulau Etorofu, yang diklaim Jepang sebagai miliknya, diduduki Uni Soviet sejak invasi militernya bulan September 1945. Sejak lama Jepang menuntut Uni Soviet agar mengembalikan keempat pulau itu, karena Jepang merasa mempunyai posisi yang dapat dibenarkan baik secara historis maupun secara hukum internasional. Tuntutan itu bukan hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari rakyat Jepang. Misalnya pada bulan Nopember 1979 sekitar 15 juta orang Jepang telah menandatangani suatu petisi yang berisi tuntutan kepada Uni Soviet agar mengembalikan pulau-pulau itu.¹

Uni Soviet sebagai pemimpin Blok Timur agaknya merasakan bahwa gerakan-gerakannya di kawasan Pasifik dalam menghadapi Amerika Serikat mendapat hambatan baik dari Jepang sendiri sebagai sekutu terdekat Amerika Serikat di kawasan ini, maupun dari pasukan Amerika yang ditempatkan di wilayah Jepang. Sementara itu semakin meningkatnya hubungan RRC-Amerika Serikat dan RRC-Jepang sejak awal tahun 1970-an merupakan suatu pukulan berat bagi Uni Soviet dan hal itu dianggap juga merupakan suatu ancaman baru yang harus dihadapi. Dengan perkembangan ini Uni Soviet semakin merasa terkepung baik dari Barat, Timur maupun dari Selatan. Ini merupakan sebab utama mengapa Uni Soviet terus berusaha meningkatkan kehadiran militernya di kawasan ini. Menurut *Defense of Japan 1982*, diperkirakan 51 divisi Angkatan Darat Uni Soviet sekarang ini ditempatkan di Timur Jauh, yaitu sekitar 47 divisi di sepanjang perbatasan Cina-Uni Soviet dan selebihnya di sepanjang pantai Pasifik termasuk di empat pulau yang sedang dipersengketakan itu. Mereka itu diperlengkapi dengan senjata-senjata modern, seperti halnya persenjataan pasukan Uni Soviet yang ditempatkan di Eropa. Di kawasan ini Uni Soviet menempatkan 2.120 pesawat tempur termasuk 420 pembom, 1.550 penempur taktis, dan 150 pesawat patroli. Sementara itu menurut *The Military Balance tahun 1982-1983*, Uni Soviet meningkatkan jumlah kapal pada armada Pasifiknya menjadi 25 SSBN, 95 kapal

¹*Japan's Northern Territories*, Ministry of Foreign Affairs, 1980, hal. 21.

selam lainnya, 85 kapal tempur besar termasuk satu kapal induk (Minsk), 210 kapal tempur kecil, 20 kapal amfibi, dan 77 kapal pendukung.

Diperkirakan Uni Soviet mempunyai 300 peluru kendali strategis nuklir SS-20 dan sekitar seperempat sampai sepertiga ditempatkan di Timur Jauh,¹ dan bahkan belakangan ini merencanakan untuk menempatkan kembali SS-20 yang ditarik dari daratan Eropa ke Timur Jauh. Rencana ini ternyata mendapat protes keras dari Pemerintah Tokyo.² Selain itu Uni Soviet juga terus meningkatkan usahanya untuk mendapatkan pangkalan-pangkalan baru di kawasan ini guna mendukung operasi angkatan lautnya. Selama ini Uni Soviet dapat singgah dan menggunakan fasilitas-fasilitas di pangkalan Angkatan Laut Da Nang dan Teluk Cam Ranh di Vietnam, dan sejak tahun 1981 Uni Soviet mulai berusaha mendekati Phnom Penh untuk mendapatkan izin singgah bagi kapal-kapal perangnya yang secara tetap ditempatkan di Laut Cina Selatan.

Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan militer Uni Soviet di kawasan Pasifik Barat itu adalah kaitan antara kemajuan ekonomi Jepang dan usaha Uni Soviet untuk memperluas pengaruhnya di kawasan. Dalam hal ini Jepang dianggapnya sebagai penghambat usaha Uni Soviet itu. Jepang, yang menganut sistem perekonomian bebas (Barat), ternyata telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan bahkan sekarang ini telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia sesudah Amerika Serikat. Keberhasilan Jepang ini rupanya sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi di negara-negara lain di kawasan seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan negara-negara ASEAN. Bahkan Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura saat ini sudah dapat digolongkan ke dalam kelompok "the new industrial countries." Hal ini kiranya sangat membambat usaha Uni Soviet itu dan mungkin negara ini merasa kuatir pengaruhnya semakin menurun di antara bangsa-bangsa di kawasan ini. Oleh karena Uni Soviet memang tidak mempunyai cara ekonomi yang dapat menyaingi Jepang dan Amerika Serikat di kawasan ini, maka ia menggunakan cara-cara lain seperti cara ideologis atau militer dalam mempertahankan dan melindungi sekutu-sekutunya di kawasan ini.

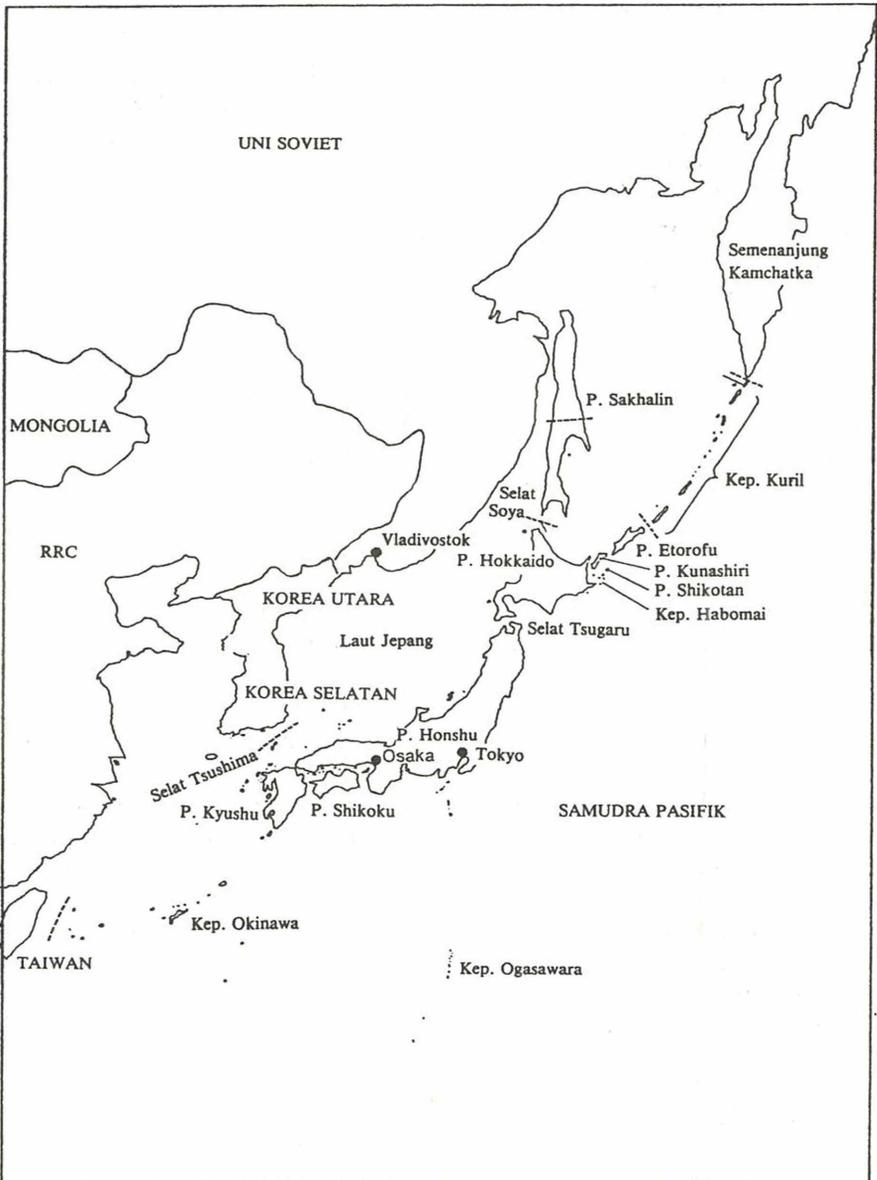
Rupanya kebijakan Uni Soviet di atas dinilai Jepang sebagai sesuatu yang mengancam keamanan nasional dan bila dibiarkan akan membahayakan kelangsungan hidupnya. Kekuatiran Jepang akan ancaman Uni Soviet itu bisa dimengerti. Menurut data yang diperoleh Badan Pertahanan Jepang, misalnya, selama lima tahun (1977-1981) pelanggaran militer Uni Soviet atas wila-

¹Soichiro Ito, "The International Situation and Japan's Defense," *Pacific Affairs*, Summer 1982, hal. 4.

²*Tokyo Kyodo*, 4 Februari 1983.

Peta 1

JEPANG DAN SEKITARNYA



yah Jepang makin meningkat. Bila di tahun 1977 pelanggaran pesawat militer Uni Soviet baru mencapai 496 kali, maka tahun 1981 meningkat menjadi 939 kali.¹ Sementara itu selama lima tahun itu rata-rata per tahun 165 kapal perang Uni Soviet lewat Selat Tsushima, 60 kapal lewat Selat Tsugaru dan 205 kapal lewat Selat Soya² (lihat Peta 1).

Lebih lagi, penggelaran kekuatan militer Uni Soviet di kawasan Pasifik itu dipandang oleh Jepang sebagai kemungkinan gangguan bagi jalur-jalur suplai energi dan sumber bahan mentah untuk keperluan industrinya, yang sebagian besar diimpor dari kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Sekarang ini diperkirakan Uni Soviet menempatkan secara tetap 10 kapal perangnya di Laut Cina Selatan³ yang bertugas mengadakan pengintaian dan pengawasan di wilayah itu dan lebih dari 30 kapal perang di kawasan Samudra Hindia⁴ yang bertugas membayangi gerakan-gerakan satuan Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan itu. Sebagian besar dari kapal-kapal perang Uni Soviet itu secara tetap bolak-balik ke pangkalan utamanya di Vladivostok, yang mau tidak mau harus melalui perairan Jepang. Bila terjadi situasi yang kritis di masa mendatang, bisa saja satuan Angkatan Laut Uni Soviet itu menjadi penghalang bagi jalur-jalur suplai Jepang tersebut.

KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG

Sementara Jepang terus berusaha menggunakan cara-cara non-militer dalam mengatasi dan mencegah ancaman atas dirinya, mengingat perkembangan yang telah disebutkan di atas tampaknya negara itu tidak hanya akan mengandalkan cara-cara non-militer saja, karena jelas bahwa yang dihadapinya itu adalah ancaman militer. Sejak Jepang menyerah kepada tentara sekutu pada tahun 1945, negara itu sepenuhnya mengandalkan pertahanannya kepada Amerika Serikat dan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pembangunan ekonomi dalam negerinya. Namun karena faktor ancaman Uni Soviet yang terus meningkat, menurunnya kepercayaan akan keefektifan perlindungan Amerika Serikat dan faktor lain seperti kejadian mendaratnya pesawat MIG-25 Foxbat di wilayah Jepang tahun 1976 tanpa dapat diketahui oleh radar-radar Jepang, negara ini sadar akan perlunya meningkatkan kemampuan pertahanan dirinya. Penyusupan pesawat tempur inilah yang mempercepat pelaksanaan reorganisasi pertahanan Jepang. Oleh karenanya pada

¹*Defense of Japan 1982*, hal. 79.

²*Ibid.*, hal. 35.

³Soichiro Ito, *op. cit.*, hal. 4.

⁴Derek Davies, "Return of the Rising Sun," *Far Eastern Economic Review*, 14 Maret 1980, hal. 20.

D A R A T	Jumlah Personal	180.000
	Satuan-satuan Dasar	
	Satuan-satuan yang digelar pada waktu damai	12 divisi 2 brigade gabungan
L A U T	Satuan-satuan Operasi Mobil	1 divisi lapis baja 1 brigade artileri 1 brigade lintas udara 1 brigade latihan 1 brigade helikopter
	Satuan-satuan peluru kendali darat-udara	8 grup artileri anti pesawat
	Satuan-satuan Dasar	
U D A R A	Satuan anti kapal tempur anti kapal selam	4 Flotila Escort
	Satuan kapal anti kapal selam (satuan wilayah)	10 divisi
	Satuan kapal selam	6 divisi
U D A R A	Satuan penyapu ranjau	2 Flotila
	Satuan pesawat anti kapal selam	16 skwadron
	Perlengkapan Utama	
U D A R A	Kapal anti kapal selam	60 (perkiraan)
	Kapal selam	16
	Pesawat tempur	16 skwadron
U D A R A	Satuan-satuan Dasar	
	Satuan pesawat radar	28 grup
	Satuan penyergap	10 skwadron
U D A R A	Satuan pesawat tempur pendukung	3 skwadron
	Satuan pesawat pengintai	1 skwadron
	Satuan pesawat transpor	3 skwadron
U D A R A	Satuan AWACS	1 skwadron
	Satuan peluru kendali darat-udara berkemampuan tinggi	6 grup
	Perlengkapan utama	
U D A R A	Pesawat tempur	430 (perkiraan)

tanggal 29 Oktober 1976, Dewan Pertahanan Nasional Jepang mencanangkan suatu "Garis Pedoman Program Pertahanan Nasional" dan pada hari yang sama Garis pedoman ini disetujui oleh Kabinet.

Garis Pedoman Program Pertahanan Nasional ini menegaskan kembali dukungannya kepada pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat dan mempunyai sasaran pokok, yaitu mencegah secara langsung setiap agresi terhadap wilayah Jepang dan menolak setiap agresi yang akan terjadi.¹ Sasaran ini akan bermanfaat tidak saja bagi Jepang sendiri, tetapi juga bagi kestabilan politik internasional di kawasan Asia-Pasifik. Penegasan terhadap pengaturan keamanan dengan Amerika Serikat itu penting sekali artinya, karena hanyalah Amerika Serikat yang dapat diandalkan Jepang untuk menghadapi setiap ancaman nuklir dari Uni Soviet atau negara lainnya. Selain itu Konstitusi Jepang memang tidak membolehkan negara itu memiliki senjata nuklir macam apa pun, dan Jepang memang tetap memegang tiga prinsip non-nuklir, yaitu tidak memiliki, tidak memproduksi dan tidak mengintroduksi senjata nuklir.²

Garis pedoman itu juga menentukan sasaran kebijakan pertahanan akhir dengan sasaran pokok peningkatan kualitas kemampuan Pasukan Bela Diri Jepang (lihat hal. 313).

Sekarang ini Pemerintah Jepang sedang berada di tengah-tengah pelaksanaan program pertahanan berdasarkan Garis Pedoman tahun 1976 itu. Untuk memperlancar pelaksanaan program itu, pada tanggal 23 Juli 1982 Dewan Pertahanan Nasional Jepang menyetujui suatu rancangan tentang "Perkiraan Rencana Pertahanan Pertengahan" atau sering disebut *Chugyo 56* yang disampaikan oleh Badan Pertahanan sebagai pelaksanaannya. Pada pokoknya rencana pertengahan itu bertujuan untuk melaksanakan rencana-rencana utama seperti yang digariskan pada Rencana Pertahanan tahun 1976, yaitu mencapai sasaran secara terpadu pemenuhan kualitas kemampuan Pasukan Bela Diri Jepang (lihat Tabel) dalam waktu lima tahun mulai tahun 1983 sampai 1987 dengan perkiraan biaya sebesar 4.400.000 - 4.600.000 juta yen (harga tahun 1982).³

DUKUNGAN RAKYAT JEPANG

Untuk mengetahui seberapa besar dukungan rakyat pada peningkatan kemampuan Pasukan Bela Diri Jepang, pengumpulan pendapat (polling) yang

¹*Defense of Japan 1982*, hal. 293.

²*Ibid.*, hal. 71.

³*Ibid.*, hal. 115.

telah dilakukan oleh beberapa harian Jepang dapat dijadikan suatu dasar pengamatan. Seperti telah disebutkan di atas, ancaman utama bagi keamanan Jepang adalah Uni Soviet. Dari semua pengumpulan pendapat yang dilakukan itu rupanya sebagian besar mendukung sikap anti-Uni Soviet dan menyatakan Uni Soviet sebagai ancaman bagi Jepang. Misalnya, pengumpulan pendapat yang disponsori harian *Asahi*, pada tanggal 7 Pebruari 1980: yang menyatakan Uni Soviet sebagai teman pilihan hanya 3%. Kemudian pengumpulan pendapat yang dilakukan oleh harian *Yomiuri* tanggal 4 Juni 1979, menyatakan bahwa 79% menganggap Uni Soviet sebagai ancaman keamanan Jepang. Sementara itu pengumpulan pendapat yang dilakukan di dalam Parlemen (DIET) oleh Nihon Keizai pada tanggal 29 September 1980 memberi gambaran bahwa 80% pro-Amerika Serikat; 77% pro-RRC dan 80% lebih anti-Uni Soviet.¹ Hal itu menunjukkan bahwa perasaan anti-Uni Soviet sudah meluas di kalangan masyarakat Jepang. Pendapat mengenai ketidakpercayaan kepada perlindungan Amerika Serikat rupanya cukup tinggi pula. Pengumpulan pendapat yang dilakukan harian *Asahi* tanggal 1 Nopember 1978 menyimpulkan bahwa 56% penjawab tidak percaya bahwa Amerika Serikat akan mempertahankan Jepang, sementara yang percaya hanya 20%. Pengumpulan pendapat untuk hal yang sama dilakukan pula oleh harian *Mainichi* tanggal 13 Juli 1979. Penjawab yang menyatakan tidak percaya sebesar 46%, sedangkan yang percaya hanya 9%.²

Tetapi hal itu tidak berarti bahwa sebagian rakyat Jepang sudah mendukung kebijakan pertahanan Jepang. Pengumpulan pendapat yang dilakukan oleh harian *Yomiuri* (tanggal 25 September 1981), misalnya, mengenai perlunya Jepang meningkatkan kemampuan Pasukan Bela Dirinya, mengungkapkan bahwa hanya 16,6% saja yang setuju, sementara 56,9% menginginkan situasi seperti sekarang dan 13,3% justru menghendaki kemampuan Pasukan Bela Diri itu diturunkan. Demikian pula pengumpulan pendapat mengenai anggaran belanja militer 1% dari GNP (ceiling) mengungkapkan bahwa yang menganggap terlalu kecil hanya 12,2%, sedangkan penjawab yang menyatakan cukup mencapai 42% dan terlalu banyak 15,3%.³ Meskipun di Jepang orang banyak menaruh kepercayaan pada pengumpulan pendapat, hal itu belum sepenuhnya dapat dijadikan ukuran pendapat rakyat dan putusan akhir Pemerintah Jepang, karena mereka masih mempertimbangkan faktor konsensus atau musyawarah dalam hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Jadi bisa saja kebijakan pertahanan yang sekarang sedang dilaksanakan itu merupakan hasil konsensus.

¹Allen S. Whiting, "The Prospect for Japanese Defense," *Asian Survey*, Nopember 1982, hal. 1138.

²*Ibid.*, hal. 1138.

³*Ibid.*, hal. 1139.

PENUTUP

Sampai sejauh mana Jepang akan mempertahankan jalur-jalur laut vitalnya itu? Kebijakan pertahanan atas jalur-jalur vital itu tentunya akan mempunyai dampak yang tidak kecil terutama bila pertahanan itu akan menyinggung kedaulatan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. "Buku Putih" Pertahanan Jepang memang tidak menyinggung banyak tentang pertahanan jalur-jalur vital itu. Tetapi sejak beberapa waktu belakangan ini pertahanan jalur-jalur vital Jepang itu banyak dibicarakan orang, terutama sejak Pemerintah Suzuki mulai merencanakan pertahanan 1.000 mil.

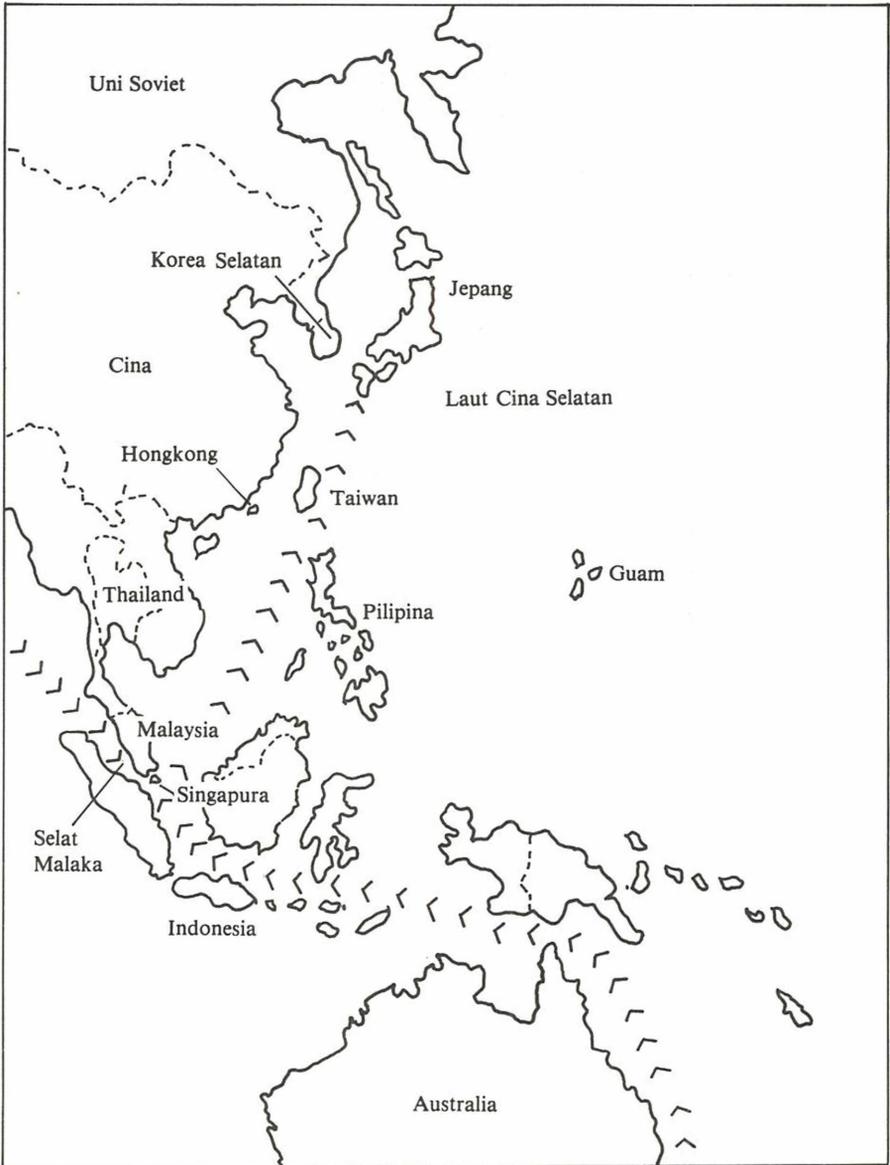
Menjelaskan konsep pertahanan 1.000 mil itu, PM Suzuki mengatakan kepada DIET pada akhir bulan April 1982 bahwa satu sasaran pemerintah dalam menghadapi suatu ancaman perang adalah menjamin transpor ke Jepang sedikitnya sepertiga dari volume impor tahunan pada masa damai. Hal itu didasarkan pada perkiraan bahwa 190 juta ton dari barang-barang impor dibutuhkan untuk mempertahankan suatu tingkat hidup yang paling minimal tanpa mengurangi atau membahayakan kesehatan. Volume impor tahunan yang sekarang ini rata-rata 620 juta ton. Perkiraan Pasukan Bela Diri Laut Jepang menunjukkan bahwa lebih dari 400 kapal barang dan tanker beroperasi di sepanjang jalur laut vital itu (lihat Peta 2) guna mempertahankan secara minimal suplai bahan mentah penting, makanan dan energi ke Jepang.¹

Rupanya PM Suzuki bersungguh-sungguh ingin merealisasikan rencana pertahanan 1.000 mil itu. Setelah berbicara di depan DIET pada bulan Mei 1982, ia bersama-sama dengan para menteri kabinetnya menetapkan perlunya melindungi wilayah perairan yang terbentang 1.000 mil ke selatan dan tenggara. Namun pengukurannya masih kabur. Para pejabat Pemerintah Tokyo mengatakan 1.000 mil itu diukur dari pantai Tokyo, yaitu hanya sampai sekitar Pulau Okinawa saja. Padahal wilayah paling selatan dari Kepulauan Ryukyu milik Jepang berada jauh di sebelah selatan Pulau Okinawa. Bila pengukuran itu dimulai dari pulau yang paling selatan di dalam gugusan Kepulauan Ryukyu, maka garis pertahanan jalur laut vital 1.000 mil Jepang itu bisa mencapai Laut Cina Selatan bagian selatan (utara Pulau Kalimantan dan wilayah selatan Pilipina). Hal ini rupanya tidak diinginkan oleh beberapa pemimpin negara-negara ASEAN. Misalnya, di dalam pernyataannya kepada pers di atas pesawat terbang ketika dalam perjalanan pulang dari kunjungan kenegaraannya ke tiga negara (Spanyol, Amerika Serikat, Korea Selatan) dan kunjungan kerja ke Jepang tanggal 22 Oktober 1982, Presiden Soeharto menyatakan antara lain bahwa pengembangan militer Jepang yang ditujukan untuk mempertahankan wilayahnya adalah wajar, tetapi pengembangan ke-

¹Lihat *Asian Defense Journal*, No. 8/1982, hal. 27.

Peta 2

JALUR-JALUR LAUT VITAL BAGI JEPANG



» : Jalur kapal-kapal dari Timur Tengah, Eropa, Amerika Latin, Afrika, Australia dan negara-negara lain yang menuju/dari pelabuhan Jepang.

kuatan militer tanpa penegasan tugas jelas akan menimbulkan kegelisahan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Lebih-lebih bila hal itu dilakukan di luar wilayah Jepang dan hanya untuk mempertahankan suplai bahan baku industri Jepang maupun pemasaran hasil industrinya agar tidak terganggu.¹ Sementara itu Presiden Marcos pernah menyatakan hal yang sama, misalnya, ketika ia mengatakan kepada PM Suzuki di Manila tanggal 9 Januari 1981 antara lain bahwa Jepang mempunyai hak untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya, tetapi Jepang yang kuat jangan sampai mencapai tingkat kapasitas untuk melakukan perang ofensif.²

Dari kedua pernyataan di atas terungkap adanya rasa kekuatiran akan peningkatan peranan militer Jepang itu. Suatu kekuatiran yang cukup ber-alasan terutama bila mengingat sejarah militerisme Jepang di Asia Tenggara pada Perang Dunia II yang masih cukup segar dalam ingatan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara. Untuk menghilangkan kecurigaan akan peningkatan peranan militer Jepang itu, Presiden Soeharto menghendaki agar Jepang membantu meningkatkan ketahanan nasional negara-negara ASEAN, sehingga pengamanan jalur-jalur laut yang vital bagi Jepang dan yang terletak di dalam kedaulatan negara-negara itu diserahkan saja kepada negara-negara yang bersangkutan. Hal ini dapat berarti dibutuhkan suatu kerja sama dan pengaturan keamanan yang lebih luas. Maka Presiden Marcos dalam kesempatan yang sama itu menyatakan bahwa ia masih tetap menghendaki kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara.

Kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Casper Weinberger, ke negara-negara ASEAN pada bulan Nopember 1982 dimaksudkan antara lain untuk meyakinkan negara-negara itu bahwa peningkatan kemampuan pertahanan Jepang itu masih dalam batas-batas yang wajar dan tidak melanggar konstitusi yang berlaku. Dalam kunjungan singkatnya itu ia mengatakan bahwa Amerika Serikat berjanji akan tetap membantu dan menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat akan kehadirannya di kawasan ini. Pernyataan Weinberger itu dapat diartikan sebagai jawaban atas desakan untuk membantu negara-negara ASEAN dalam meningkatkan ketahanan nasional dan sebagai penegasan kembali atas kehadirannya seperti yang dikehendaki Marcos.

¹*Suara Karya*, 23 Oktober 1982.

²*Kompas*, 10 Januari 1981.